

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN  
BERBASIS KOPERASI PEKERJA (*START UP COOP*) DI INDONESIA  
(Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian )**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh  
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**MUHAMMAD AULIA RACHMAN  
NPM. 1874134014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
KONSENTRASI HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN  
BERBASIS KOPERASI PEKERJA (*START UP COOP*) DI INDONESIA  
(Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian )**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh  
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**MUHAMMAD AULIA RACHMAN  
NPM. 1874134014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
KONSENTRASI HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**

**Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, M.Si  
Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aulia Rachman

NPM : 1874134014

Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS  
KOPERASI PEKERJA (*START UP COOP*) DI INDONESIA  
(Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang  
Perkoperasian )**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 6 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,

**Muhammad Aulia Rachman**  
NPM. 1874134014





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Tlp. (0721) 5617070 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN  
BERBASIS KOPERASI PEKERJA (START UP COOP) DI  
INDONESIA (Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun  
1992 Tentang Perkoperasian )**

Nama

**Muhammad Aulia Rachman**

NPM

**1874134014**

Jurusan

**Hukum Ekonomi Syariah**

Konsentrasi

**Hukum Bisnis dan Keuangan Islam**

**MENYETUJUI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Tertutup pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 16 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Heni Noviarita, M.Si**

**Dr. H. Javusman, M.Ag.**

NIP. 196511 201992032 002

NIP. 197411 062000031 002

Mengetahui

**Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Dr. Yusuf Baihaqi, M.A**

NIP. 19740 30 72000 12100 2





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Z. A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Tlp. (0721) 5617070 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS KOPERASI PEKERJA (START UP COOP) DI INDONESIA (Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)"** ditulis oleh **Muhammad Aulia Rachman, NPM. 1874134014**, telah diujikan dalam ujian tertutup pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag**

**Sekretaris : Sucipto S.Ag., M.Ag**

**Penguji I : Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Penguji II : Dr. Henny Noviarita, M.Si**

**Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Tanggal Ujian Tertutup Pada : 17 Desember 2020**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Tlp. (0721) 5617070 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS KOPERASI PEKERJA (START UP COOP) DI INDONESIA (Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)"** ditulis oleh **Muhammad Aulia Rachman, NPM. 1874134014**, telah diujikan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag**

**Sekretaris : Sucipto S.Ag., M.Ag**

**Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Penguji II : Dr. Henny Noviarita, M.Si**

**Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung

**Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag**

NIP. 19601020-1988031-005

Tanggal Ujian Terbuka Pada 10 Mei 2021



## ABSTRAK

Ekosistem dan regulasi dalam pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja atau *startup coop* perlu didukung terutama terkait beberapa kendala yang dihadapi salah satunya ialah regulasi terkait payung hukum pengembangan *startup coop* yang belum tersedia di Indonesia. Munculnya era baru di mana ekonomi digital tumbuh dan disrupsi terjadi pada banyak sektor membuat model koperasi yang lama harus mampu dan diberikan ruang untuk beradaptasi. Perspektif hukum ekonomi Islam tentang pembaruan dalam berbisnis yang terkait dengan integrasi antara *startup* dan koperasi yang melahirkan *startup coop*, hukum ekonomi Islam terkhusus pada bidang ini memiliki konsep terkait prinsip-prinsip dan asas dalam bermuamalah kemudian didukung oleh teori musyarakah syirkah, dan investasi Islami untuk melihat pembaruan dalam bidang bisnis terkait.

Permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di era digital untuk mendukung pengembangan *start up coop* di Indonesia. Kedua, bagaimana peluang dan tantangan pengembangan *startup coop* di Indonesia. Ketiga, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang prinsip-prinsip muamalah dalam pengembangan *startup coop* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang akan dibaca dan dicatat adalah buku-buku terkait koperasi, *startup coop*, sosiologi hukum, politik hukum, kebijakan publik dan Fiqh Muamalah sebagai rujukan utama serta menggunakan buku-buku karya ilmunan hukum-politik-keagamaan lain yang fokus kepada koperasi dan regulasi hukum koperasi sebagai rujukan tambahan untuk memahami pandangan hukum positif dan hukum ekonomi Islam tentang pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja atau *startup coop* di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di era digital dalam pengembangan *startup coop* di Indonesia tidak dapat mengakomodasi pengembangan tersebut dan belum mampu menjadi payung hukum bagi integrasi antara koperasi dan *startup* di era digital. Kedua, Peluang *startup coop* sangat jelas dalam menghimpun generasi muda dalam membentuk platform koperasi yang modern dan inovatif pada masa kini dan yang akan datang. Tantangan terletak pada regulasi dan dasar konstitusi ekonomi yang digunakan Indonesia terkait dasar produk hukum mengenai *startup coop* yang tidak mampu mengakomodasi gerakan koperasi modern tersebut. Ketiga, perpektif hukum ekonomi syariah tentang prinsip-prinsip muamalah sudah berkesesuaian dengan maksud *startup coop* tentang inovasi kreatif yang berlandaskan nilai persaudaraan dan kekeluargaan dengan tujuan menyerap dan mengembangkan kalangan generasi muda dalam hal pengembangan bisnis kreatif demi kemajuan bersama.

## MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

*Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.<sup>1</sup>*

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا  
يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿٢٦٩﴾

*Artinya : Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> An-Nahl ayat 78

<sup>2</sup> Al-Baqarah ayat 269



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan ridanya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini, penulisan tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta Zuhri Ali RA dan Marlisna, sebagai tanda bakti dan rasa hormat serta rasa terima kasih kupersembahkan karya kecil nan sederhana ini kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, nasihat dan dukungan yang tiada terhingga. Selalu mendoakan serta memberikan dukungan dalam setiap langkah yang Ananda pilih. Selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang tegas, berpikiran terbuka dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayahanda dan Ibunda bahagia.
2. Adikku tersayang, Adinda Hanifa yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, selalu menjadi pendengar serta kawan bicara dan kotak rahasia paling aman. Semoga Kakanda dapat menjadi teladan yang baik dan selalu bertanggung jawab.
3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terimakasih telah menjadi rumah intelektual bagi diriku untuk terus berkembang dan diberikan kesempatan untuk terus belajar sehingga menjadi pribadi yang kritis dan berwawasan terbuka.

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Aulia Rachman dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 April 1995, anak pertama dari dua bersaudara, buah hati perkawinan pasangan Bapak Zuhri Ali RA dan Ibu Marlisna. Pendidikan yang pernah penulis tempuh yang pertama yaitu Raudhatul Athfal Aji Daya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Al - Azhar 2 Bandar Lampung selama enam tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 21 Bandar Lampung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Setelah tamat menengah pertama, penulis menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) Model Bandar Lampung selama tiga tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Siyasah pada Fakultas Syariah. Kemudian melanjutkan jenjang Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan mengambil konsentrasi terkait Hukum Bisnis dan Keuangan Islam.

Bandar Lampung,                      2020  
Penulis

**Muhammad Aulia Rachman**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pengembangan *Startup Coop* di Indonesia.

Selawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Jurusan Hukum Bisnis dan Keuangan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang membantu serta menuntun penulis dan memberikan dukungan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Yusuf Baihaqi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.
3. Dr. Heni Noviarita,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana

UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Para sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan waktunya dalam hal berdiskusi, bertukar pikiran atau menemani penulis saat melalui kepenatan terkait penulisan tesis ini, khususnya kepada Bayak Djakasuria, Dirta Sanjaya AP, Septian Trisaputra, Irfan Ahadis, Dewangga Angger Prakoso, M. Adjie Shalat RD, Dwina Arif Audrian, Agung Laksono, dan Yudi Muhammad Irsan. Semoga waktu dan kebaikan kalian diberikan ganjaran yang terbaik oleh Allah SWT.
7. Seluruh teman-teman Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2018 yang telah saling mendukung di hari-hari penyusunan tesis ini, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung sangat bahagia rasanya dapat mengenal kalian semua dan menjadi bagian keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 6 Juli 2021

**Muhammad Aulia Rachman**  
NPM:1874134014



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN ORISINIL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	25

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Prinsip dan asas-asas dalam muamalah	
1. Prinsip pertama .....	28
2. Prinsip kedua .....	29
3. Prinsip ketiga .....	30
4. Prinsip keempat .....	32
5. Prinsip kelima .....	33
6. Prinsip keenam .....	35
7. Prinsip ketujuh .....	36
8. Prinsip kedelapan .....	37
9. Prinsip kesembilan .....	38
10. Prinsip kesepuluh .....	39
11. Prinsip kesebelas .....	40
12. Asas-asas dalam Muamalah .....	40
B. Teori kerjasama dalam usaha ( <i>musyarakah</i> )	
1. Konsep dasar dalam <i>musyarakah</i> .....	41
2. Landasan hukum <i>musyarakah</i> .....	42
3. Rukun dan syarat <i>musyarakah</i> .....	42
4. Macam-macam <i>musyarakah</i> .....	43

5. Kepailitan dalam <i>musyarakah</i> .....	45
6. Dampak sosial ekonomi <i>musyarakah</i> .....	46
C. Teori Investasi dalam Islam	
1. Konsep dasar investasi .....	47
2. Landasan investasi syariah .....	48
3. Prinsip dasar dan norma berinvestasi .....	49
4. Resiko dalam investasi .....	51
5. Kriteria implementasi syariah .....	54

### **BAB III STARTUP COOP DI INDONESIA**

A. <i>Startup</i> di Indonesia	
1. Pengertian dan definisi <i>startup</i> .....	58
2. Dasar hukum <i>startup</i> di Indonesia .....	59
3. Perkembangan dan pengembangan <i>startup</i> di Indonesia .....	61
B. Pengembangan <i>startup coop</i> di Indonesia	
1. Pengertian dan definisi <i>startup coop</i> .....	64
2. Negara dengan pengembangan <i>startup coop</i> yang progresif.....	67
3. Dasar hukum <i>startup coop</i> di Indonesia .....	71
4. <i>Startup coop</i> dan modernisasi koperasi .....	72
5. Pengembangan <i>startup coop</i> di Indonesia .....	74
C. Koperasi di Indonesia	
1. Pengertian dan definisi koperasi .....	78
2. Dasar hukum koperasi di Indonesia .....	79
3. Sejarah koperasi di Indonesia .....	81
4. Landasan dan tujuan koperasi .....	86
5. Jenis Usaha koperasi .....	88
6. Koperasi dan nilai-nilai keadilan dalam Islam .....	92
7. Teori ekonomi koperasi dan perusahaan.....	95

### **BAB IV ANALISIS**

A. Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di era digital untuk mendukung pengembangan <i>startup coop</i> di Indonesia .....	100
B. Peluang dan tantangan pengembangan <i>startup coop</i> di Indonesia .....	106
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan <i>start up coop</i> di Indonesia .....	112



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mulai banyak bermunculan pengusaha muda yang terkenal dengan inovasi perusahaan rintisan atau lazim disebut *startup*. Pada abad 21 ini, di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah perusahaan yang bergerak di bidang *startup*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *startup* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama Tahun 2015, salah satu negara yang paling disorot pada kuartal pertama ini adalah Indonesia.<sup>1</sup> Terutama setelah lahirnya perusahaan startup Gojek yang sudah masuk dalam kategori startup *decacorn*<sup>2</sup> Indonesia, dengan valuasi mencapai 10 miliar dollar AS.

Gojek memiliki estimasi pendapatan 8 juta dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp 109,2 miliar. Perusahaan ini bergerak dalam transportasi, logistik, dompet digital, pesan antar makanan dan minuman, serta banyak jasa lainnya. Gojek memperoleh pendanaan dari sejumlah investor, termasuk Sequoia, Capital India, dan Warburg Pincus.<sup>3</sup> Pemerintah sendiri memiliki suatu misi untuk menciptakan 1000 *technopreneurs* dengan nilai *e-commerce* mencapai USD130M pada tahun 2020, namun tidak dapat diabaikan tentang angka kegagalan *startup* di Indonesia yang sangat tinggi dengan beragam penyebab dan hambatan akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah.<sup>4</sup>

Perlu diketahui bahwa peraturan/ketentuan terkait usaha berbasis teknologi elektronik yang ada saat ini belum mampu mengatasi permasalahan terkait bidang tersebut, padahal permasalahan tersebut sangat penting untuk segera

---

<sup>1</sup> Dodi Jayen Suwarno, Annita Silvianita, 2017, *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*, Jurnal Ecodemica Vol. 1 No. 1, Universitas Telkom, Bandung, h. 99

<sup>2</sup> Level Decacorn merupakan level bagi perusahaan yang memiliki nilai valuasi sebesar USD 10 miliar setara dengan Rp 140 triliun.

<sup>3</sup> Kiki Safitri, *Lima Kasta Perusahaan Startup Indonesia, Gojek Teratas*, <https://money.kompas.com/read/2020/01/21/102554526/ini-lima-kasta-perusahaan-startup-indonesia-gojek-teratas?page=all>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB.

<sup>4</sup> Maria Dolorosa Kusuma Perdani dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Startup Di Yogyakarta*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) Yogyakarta, 23-24 Maret 2018, h. 338



diberikan solusinya karena dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintah seharusnya bisa menciptakan regulasi yang pro bisnis agar semakin banyak startup yang dapat berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.<sup>5</sup>

Melalui perspektif masifnya gerakan *startup* di Indonesia dan transformasi koperasi berbasis teknologi dewasa ini, hal ini merupakan sebuah keniscayaan di era digital, digitalisasi koperasi dengan beragam model *platform* dan layanan dengan tujuan yang sama yaitu berupa kemudahan akses dan transparansi koperasi mulai dipilih terutama bagi generasi milenial. *Startup coop*, *platform coop*, koperasi digital dan beragam model koperasi lainnya diupayakan untuk dapat membantu sektor ekonomi di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang terutama dalam bidang UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang merupakan fokus dari gerakan ekonomi kreatif.

Perlu dipahami bahwa hakikat dan definisi perkoperasian sudah dibakukan ditingkat internasional, sehingga seluruh dunia pada hakekatnya memiliki prinsip – prinsip yang sama tentang sebuah gambaran besar koperasi yaitu kerjasama, persamaan dan kemajuan bersama. Negara Indonesia dengan Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita-cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menempatkan watak atau karakteristik koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat, berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan bersendikan asas kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Karakteristik dan nilai-nilai serta prinsip koperasi inilah yang masih harus dipertahankan dalam kemajuan zaman berbasis teknologi dewasa ini. Ekonomi kerakyatan, berwatak sosial, dan persamaan bagi anggota adalah dasar dari tujuan dan landasan filosofis suatu organisasi koperasi berdiri yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan para anggotanya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dikutip Dalam *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang republik Indonesia Tentang Perkoperasian UU No.25 Tahun 1992* H. 100

Secara umum koperasi dipahami sebagai sebuah wadah perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri dengan visi memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan berkeadilan.<sup>7</sup> Pada dasarnya koperasi di Indonesia mempunyai dua dimensi, yaitu sebagai sistem ekonomi yang dicita-citakan, dan sebagai badan usaha yang berguna untuk memperjuangkan kegiatan ekonomi para anggota dalam mencapai kesejahteraannya. Sebuah koperasi dikatakan berhasil jika koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan merata.

Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya disebabkan karena koperasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah dan daya tawar bagi usaha koperasi. Demikian pula anggota bisa memperoleh nilai tambah jika berpartisipasi dalam koperasi terutama nilai tambah terkait kemajuan sumber daya manusia di dalam koperasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, semakin besar nilai tambah yang diperoleh. Nilai tambah kepada anggota bisa dicapai jika kinerja koperasi itu baik. Oleh sebab itu, semakin baik kinerja koperasi, maka kemungkinan semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, kemungkinan semakin tinggi partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

Tentang era baru di mana ekonomi digital tumbuh dan disrupsi<sup>8</sup> terjadi di banyak sektor, koperasi harus mampu beradaptasi. Tentu beradaptasi dengan cara, sikap dan *mindset* yang baru dan inovatif. Salah satunya dengan jalan membangun *pathway* serta ekosistem baru yang lebih ramah terhadap generasi

---

<sup>7</sup> Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997) h. 5

<sup>8</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan hal tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental atau mendasar. Yaitu evolusi teknologi yang menysar sebuah celah kehidupan manusia. Disrupsi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi daring adalah salah satu dampaknya yang paling populer di Indonesia.



milenial maupun generasi selanjutnya.<sup>9</sup> Konsep dan gerakan *Startup Coop* pada dasarnya adalah *startup* berbasis koperasi pekerja (*worker coop*) yang memiliki model bisnis yang inovatif, seringkali berbasis teknologi sehingga memungkinkan *di-scaling up* secara luas. Kata kuncinya adalah:

- a. Koperasi pekerja sebagai model kelembagaan koperasi;
- b. Model bisnis inovatif yang memberi solusi bagi masyarakat atau pasar;
- c. Berbasis teknologi di mana produk/layanan ditawarkan kepada pengguna;
- d. Mampu *di-scaling up* karena *channel* bisnisnya berbasis teknologi.<sup>10</sup>

*Startup coop* lahir untuk merespon tren *private startup business*. Sehingga *startup coop* berbeda dengan koperasi rintisan konvensional. Seperti halnya *startup*, kata kuncinya terletak pada *market solution* dan potensi *scaling up* atau inovasi baru dalam membangun pasar (*blue ocean market*).<sup>11</sup> Terkait basis koperasi pekerja tahapan dan tata cara membangun koperasi pekerja. Beberapa skema untuk memulai koperasi pekerja bisa dipilih. Bisa dimulai dengan mendirikan dari awal atau cara lain, yakni mentransformasi bisnis pribadi (PT/CV) menjadi koperasi pekerja. Tentu saja model dan proses bisnisnya masih sama.

Perbedaan kepemilikan yang kemudian dibagi kepada para karyawannya. Perspektif pemilik atau karyawan dianggap saling menguntungkan. Bagi pemilik, ia akan memperoleh tambahan modal baru yang bisa diinvestasikan ke usaha lain. Bagi karyawan, tentu saja akan menambah semangat kerja dan produktivitasnya.

Ekosistem dan regulasi dalam pengembangan *startup coop* perlu didukung terutama terhadap beberapa kendala yang menghalangi perkembangan *startup*

---

<sup>9</sup> Prio Penangsang, *Meretas Era Baru Coop Platform*, 2018 <https://milesia.id/2018/08/31/meretas-era-baru-coop-platform-dan-coop-tart-up/> diakses pada tanggal 20 Januari 2019

<sup>10</sup> Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), *Startup Coop sebagai Inovasi Model Koperasi di Indonesia* Sebuah Gagasan dan Praktik Awal, Paper dipresentasikan di Platform Cooperativism Conference, New York, 7-9 November 2019 di mana ICCI mewakili Indonesia untuk membagi praktika dan gagasan yang sedang berkembang di tanah air. h.3

<sup>11</sup> Laksono Hari Wiwoho, *Start up Co-op, Koperasi Generasi Milenial*, 2018 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/125742026/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial?page=all> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

*coop* di antaranya; regulasi terkait *startup coop* belum tersedia di Indonesia. Regulasi tersebut perlu mengatur beberapa hal yaitu; jumlah pendiri, UU yang berlaku saat ini Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan minimal pendiri koperasi sebanyak 20 orang. Maka dari itu perlu melakukan advokasi dan kemudian RUU Perkoperasian telah mengakomodasi dengan minimal pendiri sebanyak 9 orang.<sup>12</sup>

Regulasi lain yang perlu diatur adalah terkait model kelembagaan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja yang berbeda dengan jenis lainnya dalam hal tata kelola atau pengambilan keputusan. Beberapa regulasi Kementerian/Lembaga belum mengafirmasi Badan Hukum perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja sebagai pilihan dalam mendirikan perusahaan *startup coop*. Hal ini terkait dengan *venture capitalist* yang dominan di Indonesia. Pilar permodalan yang khusus untuk *startup coop* belum tersedia. Perlu untuk dikembangkan seperti *Venture Capital Coop* untuk mendukung akses modal bagi *startup coop* maupun gerakan model koperasi inovatif lainnya. Di sisi lain, *venture capitalist* sangat agresif dan masif di Indonesia menjadi tantangan bagi pengembangan suatu model ekonomi yang lebih mengutamakan pemerataan, kesejahteraan bersama, dan demokratis di Indonesia.<sup>13</sup>

Penting untuk mempelajari sejarah koperasi pekerja di Italia yang berkembang sejak abad 19 dalam membentuk regulasi dan menjawab tantangan terkait pengembangan *startup coop*. Regulasi di Italia telah merekognisi dan mengatur skema *take over/buy out* perusahaan privat menjadi koperasi pekerja sehingga dimiliki para pekerjanya. Model lain yang dimiliki Italia adalah berkembangnya *social coop* yang berkembang masif di sana. Berbeda dengan koperasi konvensional, *social coop* bertujuan untuk membangun inklusi sosial, misalnya bagi kelompok kurang beruntung (alkoholik, pengguna narkoba, imigran dan kelompok marginal lainnya).

---

<sup>12</sup> Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), *Op.Cit* h. 8

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 9

Pemerintah Italia juga sangat mengapresiasi keberadaan *social coop* tersebut karena berdampak nyata.<sup>14</sup>

Mencoba melakukan harmonisasi kebijakan inilah yang akhirnya dapat memberikan ruang diskusi bagi para legislator dan pegiat inovasi koperasi untuk memberikan akses pada generasi muda kedepan dengan memberikan regulasi yang responsif dan adaptif karena konstitusi Indonesia telah menggariskan konsep ekonomi kerakyatan sebagai landasan ideologi ekonomi bangsa, dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 terminologi ekonomi kerakyatan ini disebut dengan demokrasi ekonomi, sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi dengan mendasarkan pada demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi jalan tengah, tidak liberal kapitalistik dan tidak sosialis, tapi sistem ekonomi yang berakar pada Pancasila, ciri khas bangsa Indonesia.<sup>15</sup>

Meninjau dari sudut pandang Hukum ekonomi Islam terkait pembaruan dalam berbisnis tentang integrasi antara *startup* dan koperasi yang melahirkan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja atau *startup coop*, Hukum Islam dalam hal ini hukum ekonomi Islam memiliki konsep terkait konsep *musyarakah syirkah*, dan investasi Islami untuk melihat pembaruan dalam bidang bisnis terkait, kemudian hukum ekonomi Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang wajib diikuti demi kemaslahatan bersama.

Pembaruan dalam berbagai sektor menjadi sebagai sebuah keniscayaan dengan dibatasi pakem berupa nash dalam Alquran dan hadis kemudian dalam negara Indonesia konstitusi kita memuat tujuan-tujuan kehidupan (politik dan ekonomi) dalam bingkai transendental, mengacu pada kepercayaan akan adanya Tuhan, demokrasi ekonomi juga bertujuan untuk menebarkan kemaslahatan. Apabila diperhatikan, nilai dan norma dalam konstitusi semua

---

<sup>14</sup> Prio Penangsang, *Loc.cit*

<sup>15</sup> Achmad Yunus, *Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Prespektif Hukum Transendental*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018. h. 285



bertujuan untuk menciptakan maslahat, membangun kebaikan dalam komunitas negara dan kehidupan, nilai tersebut senafas dengan kandungan firman Allah terkait diutusnya Rasulullah agar menjadi contoh baik sikap, kata dan perbuatannya yang dapat menjadi ukuran dalam melakukan beragam kegiatan;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.<sup>16</sup>

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Kemudian, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terminologi kemakmuran rakyat dalam Pasal ini adalah semata-mata untuk kemaslahatan rakyat pada umumnya.<sup>17</sup>

Al-Syatibi melihat kemaslahatan dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Maqasid al-syari' (tujuan Tuhan), dan
2. Maqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf).

Maqasid syari'ah dalam arti maqasid al-Syari', mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Al-Anbiya ayat 107

<sup>17</sup> Achmad Yunus, *op. cit.* h. 288

<sup>18</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 37

Apabila mengaitkan kemaslahatan dari sudut pandang maqasid al-syariah menurut Al-Syatibi, maka hal tersebut mengukuhkan transendensi Pancasila yang ingin mentransformasikan sistem politik, ekonomi, hukum, dan sistem bernegara secara keseluruhan ke dalam nilai-nilai Ilahiah, dan melepaskan diri dari pengaruh sekularisme hukum yang dibawa oleh Penjajah selama beratus-ratus tahun dengan supremasi Ketuhanan sebagai bingkainya.

Selain itu secara spesifik pembaruan dan modernisasi koperasi tetap memberi penekanan hubungan kerjasama dan saling tolong menolong. Dilihat dari sudut pandang Islam, kerjasama dan tolong menolong juga sangat dianjurkan demi kebaikan bersama. Alquran menyatakan agar manusia bekerjasama dan saling tolong menolong, namun dengan kerjasama dan tolong menolong yang dikehendaki dan dianjurkan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan dan zalim. Hal ini dapat ditemui dalam surah Al- Maidah ayat 2, dengan redaksi sebagai berikut ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Tolong menolong dan kerjasama yang sesuai dengan sudut pandang nilai-nilai ekonomi Islam juga terdapat tatanan sosial berdasarkan keadilan dan kesetaraan, distribusi yang adil dan merata serta musyawarah di dalam pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) yang saling berkesesuaian.<sup>19</sup>

Maka dari itu pentingnya penelitian ini untuk peneliti teliti agar dapat lebih memahami perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Islam terkait pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di

---

<sup>19</sup> Al-Maidah ayat 5

era kontemporer dan kendala serta solusinya pada masa yang akan datang demi membangun ekosistem ekonomi Indonesia yang berdaya saing nasional dan global namun tidak meninggalkan landasan konstitusi ekonomi Indonesia.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Regulasi pengelolaan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) yang kurang responsif, modern dan terintegrasi terhadap perkembangan dan kemajuan zaman yang begitu cepat dan kompleks.
- b. Regulasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terkesan kurang adaptif dan responsif di era digital atau revolusi industri 4.0.
- c. Belum tersedianya hukum positif yang responsif terkait pembaruan regulasi koperasi guna menunjang daya saing nasional dan global perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di era digital.
- d. Pandangan hukum ekonomi Islam tentang prinsip-prinsip mumalah dalam pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia.
- e. Pandangan hukum ekonomi Islam terkait pembaruan regulasi koperasi di Indonesia dan pembuatan payung hukum baru terkait perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia.

### **2. Pembatasan Masalah**

Supaya lebih fokus pada tema yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka pokok masalah penelitian ini adalah:



1. Bagaimana regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di era digital untuk mendukung pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait prinsip-prinsip muamalah dalam pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui kemampuan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di era digital untuk mengakomodasi perkembangan inovasi koperasi di era digital.
2. Mengetahui peluang dan tantangan pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia.
3. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait prinsip-prinsip muamalah dalam pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang telah ada, dan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum dan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pembaruan dan modernisasi koperasi di era digital.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, regulator dan masyarakat secara umum dalam melihat masalah-masalah atau isu terbaru terakit koperasi era digital.

## F. Kajian Pustaka

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di Indonesia, maka perlu adanya referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Untuk itu peneliti menelusuri semua referensi yang membahas terkait persoalan tersebut. Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam penulisan proposal Tesis ini, yaitu:

1. Tesis Karya Ariska Aisyah Ananda Puteri Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 2018 dengan judul, *“Esensi Makna Dan Fungsi Asas Kekeluargaan Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”<sup>20</sup>*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna Asas Kekeluargaan secara filosofis dan secara Yuridis yang di mana Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam diterapkan di Koperasi Karyawan Pusri adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat berupa negosiasi maupun mediasi yang dilakukan pengurus. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak menggunakan asas kekeluargaan. Upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang memang tidaklah mudah untuk mewujudkan koperasi yang ideal untuk itu diperlukan pengertian dan itikad baik dari Pemerintah dan semua pihak.
2. Tesis karya Muhammad Amin Mahasiswa Program Pascasarjana *Hukum Islam* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul, *“Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi”* Tesis ini

---

<sup>20</sup> Ariska Aisyah Ananda Puteri, *Esensi Makna Dan Fungsi Asas Kekeluargaan Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 2018.

menunjukkan bahwa kekuatan hukum untuk mengikat membuat Koperasi LKMS Anggrek mendaftar pada OJK dengan perubahan anggaran dasar yang bertujuan merubah dan menambah poin terkait kelembagaan, kegiatan usaha, cakupannya, serta pembinaan dan pengawasan. Sedangkan BTM Surya tidak demikian, melainkan memilih PERMEN No 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 untuk memayungi operasionalnya, sesuai dengan arahan dinas koperasi. Hal ini dikarenakan, adanya polemik terkait UU LKM dengan UU Perkoperasian beserta aturan turunan. Kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi. Ketika diukur dalam tingkat kepatuhan, maka kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek sampai pada tahap *identification*, dan upaya mewujudkan program “*Service City*” (*hifz an-nafs*) dan mengandung maksud perkembangan ekonomi, (*hifz al-mal*). Sedangkan kesadaran hukum BTM Surya terhadap UU LKM, tidak serta merta membuatnya patuh. Namun langkah pengurus dalam mengelola harta merupakan upaya (*hifz al-mal*). Dan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas merupakan interpretasi dari upaya (*hifz an-nafs*).<sup>21</sup>

3. Tesis karya Stefan E. Kamuntuan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga tahun 2018 dengan judul, “*Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia*” Tesis ini menganalisis dasar pertimbangan hukum MK dalam putusan No. 28 /PUU-XI/2013 dan mengidentifikasi serta menganalisis unsur kemanfaatan dari Undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui putusan tersebut. Dalam amar Putusan MK Nomor 28 /PUUXI/2013 menyatakan membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena bertentangan dengan UUD 1945, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka dikembalikan ke Undang-undang yang lama yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, pada kenyataannya Undang undang yang

---

<sup>21</sup> Muhammad Amin, *Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi* (Tesis), Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018.



lama sudah tidak relevan dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global saat ini, sebaliknya Undang-undang yang dibatalkan oleh MK tersebut menurut peneliti memiliki ketentuan yang sudah sesuai dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global. Maka dari itu, hasil penelitian ini adalah menentang dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru memiliki unsur kemanfaatan di dalamnya yang dapat memberikan hal positif bagi perkembangan koperasi kedepannya.<sup>22</sup>

Hasil penelitian di atas membahas tentang koperasi, regulasi koperasi dan beberapa permasalahan hukum didalamnya namun, beberapa penelitian belum ada yang membahas terkait pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja (*startup coop*) di era digital dari sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan titik persoalan yang diteliti berfokus pada Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terkait pengembangan *Startup Coop* di Indonesia belum banyak yang meneliti.

## G. Kerangka Teori

### 1) Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>23</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Stefan E. Kamuntuan, *Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia* (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2018.

<sup>23</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), h. 342.

<sup>24</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

Istilah hukum progresif di sini penulis peroleh dari istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.<sup>25</sup>

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>26</sup>

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 154.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

diamanatkan oleh UUD 1945. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>27</sup>

Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik, formalistik, represif dan *status quo* telah banyak mengundang kritik dari paripakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum, seperti dalam ilmu hukum praktis. Pengertian hukum progresif ini kiranya tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.<sup>28</sup>

Gagasan tentang pembangunan hukum nasional yang progresif sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih berfokus pada paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri. Satjipto menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan paradigma peraturan (*rule*), sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia (*people*). Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 1.

<sup>28</sup> Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2), h. 84



bersikap submisif atau tunduk pada hukum yang ada melainkan bersikap kritis.<sup>29</sup>

Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yang paling utama adalah bertujuan untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata bermaksud untuk mengadakan pembaruan (*an sich*), akan tetapi juga diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatak progresif, yang mana kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem-sistem nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya.<sup>30</sup>

## 2) Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila ada dua unsur bertemu pada satu titik singgung, yaitu:

- 1) Timbulnya keadaan atau situasi baru
- 2) Kesadaran kolektif akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan atau terkena dampak dari perubahan tersebut itu sendiri.

Menurut Sinzheimer, “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, apabila dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terdampak, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru atau pembaruan terhadap suatu situasi.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), h. 1-17.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. (Angkasa Bandung, Bandung, 1986), h.

Selain itu, Arnold M. Rose mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan dengan hukum, yaitu:

- 1) Penemuan dan inovasi pada bidang teknologi,
- 2) kontak atau konflik antara kebudayaan, dan
- 3) gerakan sosial (*social movement*) baik secara lokal maupun global.

Menurut ketiga teori tersebut, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Apabila ditelaah perihal apa yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan, maka pada umumnya dapat disimpulkan bahwa unsur yang dirubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Terkait penyebab masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu unsur tertentu adalah mungkin karena ada unsur baru yang lebih menguntungkan sebagai pengganti unsur yang lama. Mungkin juga terjadi suatu perubahan yang membutuhkan suatu penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.

Pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Penyebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru (inovasi), konflik maupun kontak kebudayaan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada penyebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan seterusnya.

Mengenai hubungan dengan perubahan hukum perlu juga disinggung faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial, yaitu faktor yang mendorong atau menunjang dan yang menghambat. Terkait faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap keuntungan pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong faktor-faktor tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang

menghambat, seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dan terbelakang, sikap masyarakat yang terlalu tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru yang muncul, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat.

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud dalam teori hukum dan perubahan sosial adalah hukum tertulis atau perundang-undangan (dalam arti luas). Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-undangan seperti statis, kaku, kurang jelas, tidak lengkap, tidak tuntas, kurang responsif dan kurang adaptif. Pandangan klasik dan dogmatik-normatif cenderung memandang hukum bersifat pasif dalam perubahan. Hukum dipandang sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya.<sup>32</sup>

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan fasilitas-fasilitas guna melayaninya keperluan dan kebutuhan masyarakat mendorong dilakukan reorganisasi kehidupan sosial atau kelembagaan. Semakin banyak penggunaan teknologi modern, maka manusia dihadapkan pada suatu kniscayaan untuk melakukan penyesuaian, maka perubahan sosial merupakan ciri masyarakat modern dewasa ini, dapat diperkirakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh hukum tidaklah sederhana seperti pada abad-abad yang lalu, pada saat perubahan sosial belum berjalan seintensif dan kompleks seperti sekarang ini.<sup>33</sup>

Hukum dituntut mampu dan adaptif menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatasi konflik

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta : Kencana 2013) h. 203

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010) h.123



kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo :

"... Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya."

### 3) Teori Konstitusi Ekonomi

Era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu masif tidak dapat dihindarkan namun tetap memerlukan suatu landasan kesepakatan bagi tiap-tiap negara dalam memasuki era disrupsi. Hal ini diperlukan agar tidak larut dalam pragmatisme zaman yang begitu cepat dan kompleks. konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi dalam merumuskan kebijakan - kebijakan ekonomi dalam satu negara atau satu kesatuan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara terkait.

Jimly Asshiddiqie menjabarkan gagasan tentang konstitusi ekonomi di mana suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan itulah yang memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan dan pengembangan suatu kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturan yang tertuang dalam konstitusi itu dapat bersifat *rigid*, rinci, dan eksplisit, tetapi dapat pula bersifat fleksibel atau bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat implisit saja seperti dalam Konstitusi Amerika Serikat.<sup>34</sup>

Bagaimanapun sifat penuangan kebijakan ekonomi di dalamnya, konstitusi sebagai dokumen hukum dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konstitusi tersebut, baik yang dimuat secara eksplisit ataupun implisit, dijabarkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti Undang - Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan ini berfungsi sebagai instrumen atau alat yang memacu laju

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas 2016) h. 68

perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat ekonomi disebut sebagai salah satu elemen institusional dalam dinamika perekonomian menjadi mandek.<sup>35</sup>

Pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yang luas terjadi dalam perekonomian. Ketidakpastian juga terkait dengan pengertian yang terkandung dalam konsep sistem ekonomi (*economic system*), tata ekonomi (*economic order*), dan konstitusi ekonomi (*economic constitution*). Para sarjana seringkali mengacaukan penggunaan istilah itu untuk pengertian yang sama.

Demikian pula yang terjadi dengan perkataan *economic constitution* (konstitusi ekonomi), dan *economic constitutional law* (hukum tata ekonomi), serta konstitusionalisme ekonomi yang sering dianggap mempunyai makna yang sama. Memang tidak mudah untuk memperkenalkan konsep-konsep hukum ke dalam pengertian-pengertian ekonomi ini sebaliknya. Menurut beberapa sarjana, melibatkan pengertian dan logika hukum (*legal meanings*) ke dalam ilmu ekonomi dapat menghancurkan kekhasan ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu yang bertitik tolak dari sistem norma.<sup>36</sup>

Pada sisi lain istilah *economic constitution* mulai muncul pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, pada awalnya hanya dipakai dalam perspektif ilmu ekonomi atau ilmu hukum pada umumnya. Konstitusi ekonomi sebagai objek kajian hukum tata negara atau sebagai persoalan hukum konstitusi dapat dikatakan memang masih sangat baru. Pada level dunia, hal itu masih sangat baru, apalagi di Indonesia, sama sekali belum ada satupun sarjana hukum yang menyadarinya apalagi untuk memperbincangkannya dalam konteks relasi menuju harmonisasi konstitusi dan hukum tatanegara. Dalam konteks Uni Eropa, misalnya, istilah konstitusi ekonomi (*economic constitution*) itu juga mulai biasa dipakai untuk pengertian mengenai dasar-dasar pengaturan tentang kebijakan ekonomi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 68-69

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Ceramah Jimly Asshiddiqie disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012.

Dengan demikian, jika membahas mengenai konstitusi ekonomi berarti berbicara mengenai perekonomian yang didasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, karena itu semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika bertentangan, maka kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum peraturan yang lebih rendah itu dapat dibatalkan melalui proses *judicial review* oleh pengadilan ataupun melalui proses *executive review* oleh lembaga yang lebih tinggi. Ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang di dalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Karena itu, ekonomi konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ekonomi, dan demikian pula sebaliknya.<sup>38</sup>

#### 4) Teori Maqasid Al-Syariah

Konsep tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang penting. Inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada zahir teks dan lafal serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban

---

<sup>38</sup> *Ibid*

membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu sha' dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-istinja' (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *asynan* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan syar'i dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.<sup>40</sup>

Situasi dimana kemashlahatan dapat terealisasi, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teksteks secara umum yang men-support untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.<sup>41</sup>

Menurut Syathibi setiap dasar syara yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara serta disimpulkan dari dalil-dalil

---

<sup>39</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāsid*, Inda alImâm al-Shâthibi, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 295

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 296.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 304



maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil mursal, dan istihsan yang keduanya adalah untuk menjaga masalah. Menjaga kemashlahatan jika mashlahat tersebut haqiqiyah (mashlahat yang benar-benar mashlahat) yang sesuai dengan tujuan syara maka ia merupakan dasar yang qathi yang harus dijadikan pijakan hukum.<sup>42</sup>

Prinsip hukum ekonomi Islam dalam membuat suatu regulasi diantaranya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. Prinsip tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

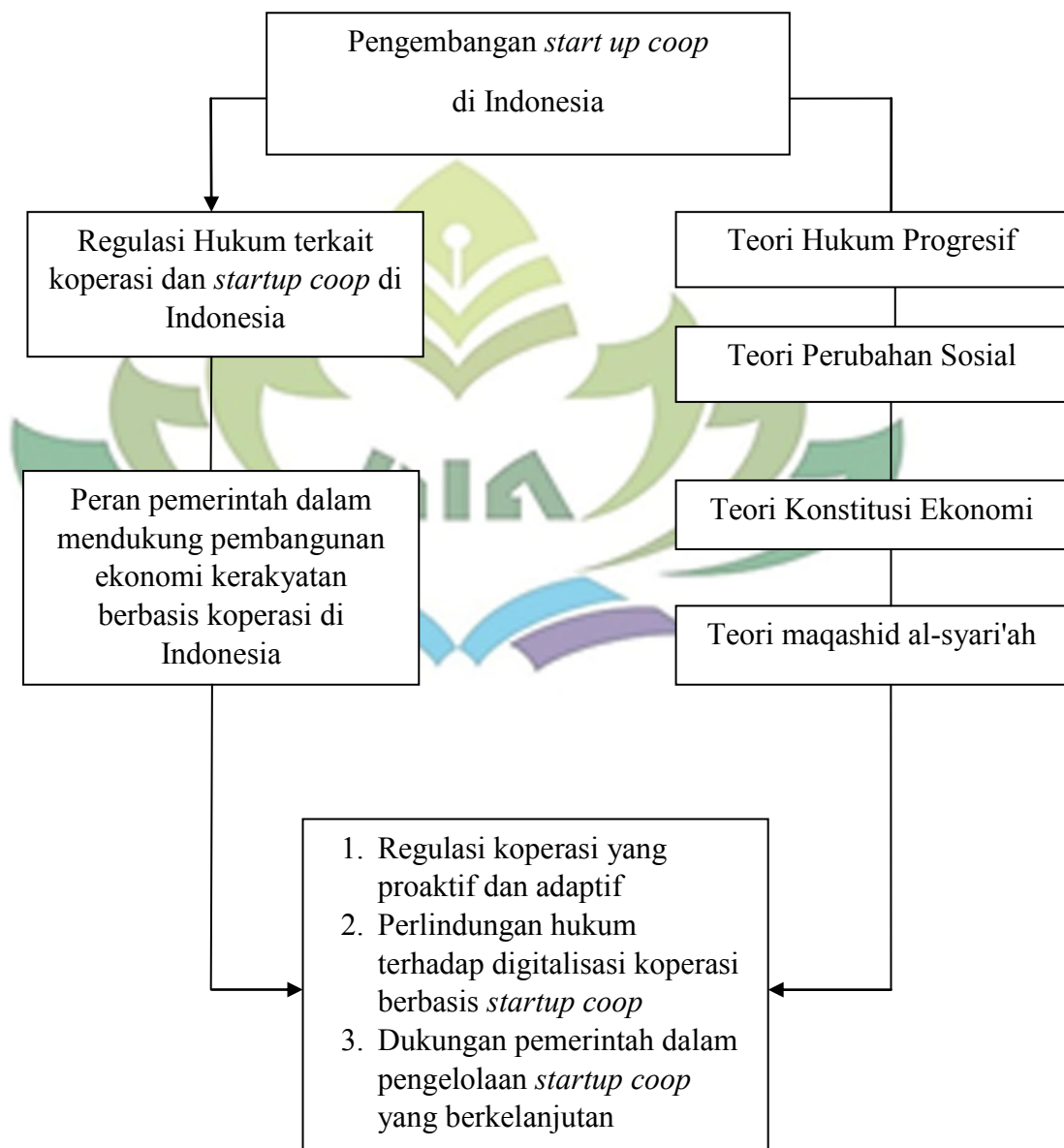
Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan

---

<sup>42</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz I, h. 39

kebijakan moneter serta fiskal. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.<sup>43</sup>

Gambar Bagan Kerangka Teori



<sup>43</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah* (Jurnal Asy-Syari' Ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018) h. 148-149

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini data yang akan dibaca dan dicatat adalah buku-buku terkait koperasi, *startup coop*, sosiologi hukum, politik hukum, kebijakan publik dan Fiqh Muamalah sebagai rujukan utama serta menggunakan buku-buku karya ilmuwan hukum-politik-keagamaan lain yang bertamakan koperasi dan regulasi hukum koperasi sebagai rujukan tambahan untuk memahami pandangan hukum positif dan hukum ekonomi Islam terkait pembaruan koperasi di era digital.

### 2. Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian pustaka adalah di mana subjek data diperoleh. Data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan Alquran dan hadis terkait Prinsip – Prinsip dan Asas-asas hukum Islam dalam hal ini Fiqh Muamalah terkait regulasi koperasi dan politik hukum *startup coop* kemudian karya ilmiah terkait esai dan buku yang membahas regulasi koperasi dan *startup coop* secara nasional dan internasional guna mendukung program digitalisasi koperasi.

#### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku, koran, karya tulis, majalah, bulletin, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini yang kaitanya dengan pemikiran politik hukum, hukum

---

<sup>44</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.3.

ekonomi Islam dan politik hukum Islam dalam melihat pembaruan koperasi di era digital.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelaahan yang dalam hal ini penelitian lakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku dengan tema koperasi, *startup coop*, politik hukum, politik hukum Islam, Fiqh muamalah, kebijakan publik, sosiologi hukum, filsafat hukum, serta artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini terkait penelitian yang penulis lakukan.

### 4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode induktif, yakni :

- a. Induktif, yaitu suatu cara pengenalisaan obyek ilmiah tertentu dari ketentuan – ketentuan khusus kemudian menarik kesimpulan umum. Dengan metode ini akan dianalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pengembangan regulasi *startup coop* di Indonesia kemudian diambil kesimpulannya tentang bagaimanakah peluang serta tantangan pengembangan *startup coop* terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maaliyah. Bentuk-bentuk bisnis dan metode baru berkembang dengan cepat, seperti *hedging*<sup>45</sup>, *sekuritisasi*,<sup>46</sup> *money market*,<sup>47</sup> *capital market*,<sup>48</sup> investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*,<sup>49</sup> bursa komoditi, indeks trading, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C,<sup>50</sup> dsb. Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan unit keuangan mengalami kemajuan yang

---

<sup>45</sup> Strategi trading untuk "membatasi" atau "melindungi" dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi (loss) meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit.

<sup>46</sup> sekuritisasi (dalam bahasa sederhana), adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain (dalam hal ini investor), sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima keuntungan dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut

<sup>47</sup> Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek.

<sup>48</sup> Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call)

<sup>49</sup> Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (e-commerce) dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama.

<sup>50</sup> L/C merupakan janji membayar dari Issuing Bank kepada Beneficiary/Eksportir/penjual yang mana pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh Issuing Bank jika Beneficiary menyerahkan kepada Issuing Bank dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

sangat pesat, seperti perbankan, leasing (multifinance), *mutual fund*,<sup>51</sup> sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fidusia<sup>52</sup> dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dsb. Produk-produk perbankan syariah juga berkembang secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar ekonomi syariah.

Oleh karena perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian.

Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya.

Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara dalam sesuai konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif kontemporer dalam koridor syariah Adapun terkait prinsip-prinsip utama dalam muamalah yang menjadi pondasi dan landasan pokok dalam kegiatan bermuamalah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pertama adalah Harta merupakan milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugerah yang Allah berikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia baik secara komunal maupun

---

<sup>51</sup> (Mutual Fund) adalah reksadana sebagai wahana investasi yang sifatnya kolektif (menghimpun dana dari banyak orang) untuk dibeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

<sup>52</sup> Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

yang bersifat Individual.<sup>53</sup> tentang hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam Alquran surat An-Nahl ayat 53 dan surat Fatir ayat 3, sebagai berikut :

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ﴿٥٣﴾

Artinya :

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, Maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, Maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya :

Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi ? tidak ada Tuhan selain dia; Maka Mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?

- Prinsip kedua adalah, Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk mengelola harta (*istikhlaf al maal*) yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, oleh karena itu didalam penggunaan harta dan cara memperoleh harta harus tunduk kepada ketentuan Allah.<sup>54</sup> Hal ini diterangkan dalam Alquran suart Al-an'am ayat 165, Surat Al - Hadid ayat 7 dan, surat Yunus ayat 14.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

<sup>53</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Al-mabaadi' wa al-qiyam al- Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah*, Majmu''ah dallah al barokah li idaroh at tathwir wa al buhuts. cet 1, 1414 H, h. 19

<sup>54</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Op.cit* h. 21

Artinya :

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٦٥﴾

Artinya :

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.<sup>55</sup> Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya :

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

3. Prinsip ketiga adalah, kepemilikan harta bukan suatu tujuan namun merupakan sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada umat manusia melalui rezeki yang baik serta merupakan sarana untuk mewujudkan suatu kemaslahatan umum.<sup>56</sup> hal ini diterangkan dalam Alquran surat Al-Anfal ayat 26, Al-Kahfi ayat 46 dan surat al raf ayat 31-32 sebagai berikut :

<sup>55</sup>Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

<sup>56</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Op.cit*, h. 23



وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ  
النَّاسُ فَآوَيْنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya :

Dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلٍ ۝

Artinya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ  
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

Artinya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid <sup>57</sup>Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

<sup>57</sup>Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

lebih. <sup>58</sup>Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."<sup>59</sup> Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

4. Prinsip keempat adalah, kebolehan melakukan pengembangan harta dan larangan melakukan monopoli dan menimbun harta. Prinsip tersebut menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga maslahat dan manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak. <sup>60</sup> Sesuai dengan Alquran surat At-taubah ayat 34-35, surat An-Nisa ayat 39 dan, surat Al – Humazah ayat 1-3.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتَنُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta

<sup>58</sup> Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

<sup>59</sup> Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

<sup>60</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Op.cit*, h. 27

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ  
أَخْلَدَهُ ۚ

Artinya :

Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpul lagi pencela, Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,<sup>61</sup> Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya.

5. Prinsip kelima adalah, terkait dengan pencatatan dalam proses transaksi. Hal ini terkait dengan upaya penjagaan kepentingan masing-masing pihak dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa. Hal-hal seperti lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (*tautsiq*) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemiliknya.<sup>62</sup> Tentang masalah ini dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 282-283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ  
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

<sup>61</sup> Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkanya di jalan Allah.

<sup>62</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Op.cit*, h. 30

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ  
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُودِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ  
أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>63</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih

<sup>63</sup> Bermuamalah ialah seperti jual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.



dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang <sup>64</sup>(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6. Prinsip keenam adalah mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang baik dan halal. Islam mengharamkan setiap usaha memperoleh harta yang akan menimbulkan kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak culas, curang (menipu). Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental. Serta membelanjakannya dalam hal yang di izinkan secara syar'i. <sup>65</sup> sesuai dengan apa yang disampaikan Alquran dalam surat An-Nahl ayat 90 dan, surat Al-maidah ayat 100.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

<sup>64</sup>Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>65</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Opcit*, h. 32-38

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya :

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

7. Prinsip ketujuh adalah haramnya riba dan memperoleh harta dengan cara batil dan bertentang dengan nilai-nilai Alquran. Keharaman riba dikarenakan penguasaan haq orang lain tanpa cara yang benar dan dilarangnya memperoleh harta dengan cara batil karena menimbulkan permusuhan dan kebencian didalam masyarakat. <sup>66</sup> Dijelaskan dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 39 dan An-Nisa ayat 29.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

<sup>66</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Opcit*, h. 35

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; <sup>67</sup>Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

8. Prinsip kedelapan adalah proposional dan adil dalam pedistribusian harta. Seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan harta dan harus tepat guna dan tepat sasaran dalam menggunakan hartanya serta jauh dari sikap *ifroth* (berlebihan) atau *tafrith*(menyepelekan). <sup>68</sup> Alquran menjelaskan terkait hal ini dalam surat Al-Isro ayat 29 dan surat Al-Furqan ayat 67.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

﴿٢٩﴾

Artinya :

<sup>67</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>68</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Opcit*, h. 40

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu<sup>69</sup> kamu menjadi tercela dan menyesal.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٩﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

9. Prinsip kesembilan adalah jujur dan amanah dalam melakukan transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini merupakan implementasi tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.<sup>70</sup> Hal ini terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 105 dan surat Al-Mukminun ayat 8.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿٨٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

<sup>70</sup> Ibid, h. 43

<sup>71</sup>Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi,



وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

10. Prinsip kesepuluh adalah intervensi negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (*resources*) bagi warga negara. Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya.<sup>72</sup> Mengenai hal ini terdapat pada Alquran surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

---

Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

<sup>72</sup> Izzuddin Muhammad Khoujah, *Opcit*, h. 60

11. Prinsip kesebelas adalah tolong menolong dengan sesama dalam muamalah. Sehingga harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan maslahatnya untuk semua.<sup>73</sup> Terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Selain prinsip dalam muamalah ada beberapa asas dalam muamalah, diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>74</sup>

1. Asas *al-Huriyah* (kebebasan) Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.
2. Asas *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan) Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
3. Asas *al-Adalah* (keadilan) Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

<sup>73</sup> Ibid, h. 55

<sup>74</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang, UIN Malang Press : 2009) h. 46

4. Asas *al-Ridho* (kerelaan) Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
5. Asas *ash-Shidiq* (kejujuran) Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Sehingga ketika terdapat unsur kebohongan dalam proses transaksinya, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

## **B. Teori kerjasama dalam usaha (*musyarakah*)**

Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*. Menurut bahasa arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasyruku* (fiil mudhari), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu atau serikat, menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

### **1. Konsep dasar dalam *musyarakah***

Secara fiqih *Syirkah syar'iyah* terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama rida di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut.

Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini

tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.<sup>75</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>76</sup>

## 2. Landasan hukum *musyarakah*

Landasan hukum musyarakah dalam perdagangan adalah sebagaimana dengan firman Allah dalam surat surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

## 3. Syarat dan rukun *musyarakah*

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.

<sup>75</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), h.96

<sup>76</sup> *Ibid.* h.95



- c) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.<sup>77</sup>

Musyarakah memiliki beberapa rukun diantaranya :

- 1) Ijab-qabul (*sighat*) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek aqad yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.<sup>78</sup>

#### 4. Macam – macam musyarakah

Macam-macam Musyarakah Secara garis besar syirkah terbagi kepada dua bagian:<sup>79</sup>

##### 1) Syirkah *Al-Amlak*

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah.<sup>80</sup>

Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah

<sup>77</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h.119

<sup>78</sup> Naf'an, *Op.cit*, h.98.

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2010), h.344.

<sup>80</sup> Ibid h.334

antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Syirkah al-jabr, Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
- b) Syirkah Ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.<sup>81</sup>

## 2) Syirkah *Al-'Uqud*

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

### a) Syirkah *Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

### b) Syirkah *Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.<sup>82</sup>

### c) Syirkah *Al-'Amal*

Syirkah al-'amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Op,cit*, h.130

<sup>82</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h.177-178.

sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa'i.<sup>83</sup>

d) Syirkah *Al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prastise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.<sup>84</sup>

e) Syirkah Mudharabah

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.

## 5. Kepailitan dalam *musyarakah*

Dalam Hukum Islam istilah pailit biasa disebut dengan taflis. Secara etimologi taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas berarti tidak memiliki harta. Secara terminologi, taflis ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Para ulama fiqih mendefinisikan taflis yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, h.50

<sup>84</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), h. 142

<sup>85</sup> Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo : Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005), h.23

Hukum-hukum at-taflis adalah berikut ini. Orang yang mengalami bangkrut (*at-tajlis*) dikenakan *al-hajru* jika para kreditur menghendakinya. Seluruh aset orang yang mengalami at-taflis (bangkrut) dijual, kecuali pakaiannya dan sesuatu yang harus dimilikinya, seperti makanan, kemudian hasil penjualannya dibagi secara rata di antara para kreditur.

Jika di antara salah satu kreditur menemukan barangnya dalam keadaan utuh tanpa perubahan sedikit pun pada orang yang mengalami bangkrut (*at-taflis*), maka orang tersebut lebih berhak mengambilnya daripada kreditur lainnya, karena Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa menemukan barang pada orang yang telah bangkrut, orang tersebut lebih berhak terhadapnya". (HR. Muttafaq Alaih). Ini dengan syarat, orang tersebut tidak pernah mengambil sedikit pun dari uang hasil penjualan barang tersebut. Jika orang tersebut pernah mengambilnya, orang tersebut mempunyai hak yang dengan para kreditur lainnya.

#### **6. Dampak sosial ekonomi *musyarakah***

Allah Yang Maha Bijaksana hanya membuat cara yang bermanfaat untuk manusia berupa kebaikan dan keuntungan. Cara untuk mendapatkan manfaat itu banyak dan bermacam-macam, yang setiap cara tersebut mempunyai hukum dan hikmah masing-masing.

Dalam berserikat, usaha yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi adalah dua orang pengusaha yang membuat perjanjian kerja sama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi keduanya dari segi produksi dan pendapatan, makin banyak usaha, meningkatnya pasar dan makin luas jaringan pasar serta bangunan pabrik-pabrik yang baru.

Kalau penemuan-penemuan makin banyak dan jangkauan perusahaan makin luas maka akan meningkatkan sarana kesejahteraan bagi manusia dalam semua aspeknya, sehingga orang muslim tidak menjadi beban orang lain, karena bersungguh-sungguh berkreasi dalam teknologi perusahaannya. Serikat ini juga berfungsi untuk mendidik seorang memiliki sifat amanah, jujur, berkomunikasi dan bertindak yang cerdas, karena ia merupakan keutamaan yang paling utama dalam berperilaku ekonomi.



Dengan serikat, setiap orang berusaha menuntut kemampuan berwirausaha dan pengembangan potensi sumber daya manusia untuk melakukan daya saing yang kompetitif. Karena sumber daya manusia adalah penentu dari sumber daya yang lain, seperti, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya moral dan lain-lain.

### C. Teori Investasi dalam Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.<sup>86</sup>

#### 1. Konsep dasar investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsma*<sup>87</sup> yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*.

Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.<sup>88</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian.

<sup>86</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 14.

<sup>87</sup> Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, h., 30

<sup>88</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), h. 7.

Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan yang banyak, mungkin stagnan atau hanya kembali modal mungkin pula bangkrut. Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah.<sup>89</sup>

## 2. Landasan investasi syariah

Investasi dalam Islam, selain sebagai pengetahuan, juga bernuansa spiritual, karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu yang bersifat amaliyah. Investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam alquran surat Al-hasyr ayat 18, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian, dalam surat Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya :

<sup>89</sup> Sakinah, *Investasi dalam Islam*, (Jurnal Iqtishadia Vol . 1 No.2 Desember 2014) h. 250

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.<sup>90</sup> dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

### 3. Prinsip Dasar dan Norma Berinvestasi

Perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembali) yang tidak pasti dan tidak tetap.

Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap.<sup>91</sup>

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi di atas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembali (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*).

Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembali (return of investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik riba, zulm, maysir & gharar. Agar terhindar dari praktik investasi, yang tidak

---

<sup>90</sup> Maksudnya, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

<sup>91</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59. dan, Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 40.

Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu <sup>92</sup>

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*).
- e. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). <sup>93</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysir). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider trading*. <sup>94</sup>

Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falah* (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di akhirat.

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*



#### 4. Resiko Dalam Investasi

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam. Dengan menyadari perbedaan Fiqiyah yang ada dan belajar dari praktik negara lain, instrument investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi.<sup>95</sup>

Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasar UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden dan didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (*bai' ad-dayn*)<sup>96</sup> dengan segala kontroversinya.

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam seperti usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu, dengan

---

<sup>95</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 140

<sup>96</sup> Bai' ad-dayn atau disebut juga dengan istilah bai' al-sharf, yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya seperti Dirham, Dolar dan alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Lihat Ghufroon A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.141

mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah masih terbatas, seluruh emiten dapat dapat memiliki pendapatan dari penempatan dananya di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga.

Oleh karena itu, pemilihan emiten yang benar-benar terdapat dari pendapatan tersebut sangat sulit. Situasi ini dianggap sebagai suatu kondisi darurat yang sifatnya sementara sampai ada sistem perekonomian yang telah memasukkan nilai ajaran Islam.

Demikian juga apabila emiten merupakan perusahaan induk, harus dipertimbangkan juga jenis kegiatan usaha anak-anak perusahaannya. Jenis kegiatan emiten yang dianggap tidak layak di investasikan ialah ; apabila tingkat pencapaian bunga bersih beserta pendapatan non halal, baik dari emiten maupun anak-anak perusahaannya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya diatas 15%.

Begitu pula, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50 % di perusahaan yang usahanya bertentangan dengan syariah Islam, maka jenis kegiatan emiten seperti ini juga dianggap bertentangan dengan syariah Islam.

Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyaath*) serta tidak boleh melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, termasuk tindakan melakukan penawaran palsu (*najsy*), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*), menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*),<sup>97</sup> melakukan

---

<sup>97</sup> Seperti jual-beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*), jual beli barang yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat diapastikan adanya (*bai' al-gharar*), *bai' al-urban*, *bai' al-majhul*, dan lain-lain. Selengkapnya baca karya Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.131 – 138.

penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.

Nisbah utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur pembiayaan suatu emiten. Apakah emiten tersebut sangat bergantung dengan pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Nisbah utang terhadap modal merupakan perbandingan antara utang terhadap total nilai modal termasuk cadangan, laba ditahan, dan utang dari pemegang saham.

Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 81% (utang 45%, modal 55%), maka emiten tersebut dapat dianggap bertentangan dengan syariah Islam. Nisbah yang diizinkan (diperbolehkan) akan ditentukan perkembangannya setiap waktu oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>98</sup>

Selain itu, dalam melakukan penempatan investasi pada suatu perusahaan, harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang islami, maka resiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas yang wajar.

Pada akhirnya hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal (investor). Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur tidak halal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur tidak halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min alharam*).<sup>99</sup>

Jadi jelas bahwa dalam berinvestasi umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu, para pemilik modal harus mengetahui investasi yang diperolehkan oleh syariah Islam.

---

<sup>98</sup> Sakinah, *Investasi dalam Islam*, (Jurnal Iqtishadia V o l . 1 No. 2 D e s e m b e r 2 0 1 4) h. 257

<sup>99</sup> *Ibid*

## 5. Kriteria Implementasi Syariah

Investasi pribadi dibagi menjadi dua cara. Pertama investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja & modal sendiri. Sedangkan yang kedua investasi pasif yaitu investor menyediakan modal dan menerima *return* (pengembalian/hasil) tetapi tidak terjun dalam proyek itu.<sup>100</sup>

Investor pasif mempunyai 3 opsi. Pertama, menandatangani modal (uangnya) pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima deviden.

Dalam pandangan ekonomi Islam dua opsi tersebut dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan income riba. Maka dari itu dilarang. Sementara opsi terakhir dan investasi aktif dibolehkan dalam Islam. Pada sisi pengusaha, dia boleh membiayai proyeknya dengan menggunakan modal sendiri, dengan menjual saham pada usahanya, atau meminjam dengan bunga.

Dalam tatanan ekonomi Islam dua metode pertama dibolehkan, sedangkan metode terakhir dilarang. Dari semua uraian yang telah disebutkan terdahulu dapat disimpulkan bahwa investasi yang diperbolehkan adalah investasi yang tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, maysir dan lain sebagainya.

Berikut ini sebagian dari produk investasi di Bank Syariah Berkaitan dengan investasi, Bank Syariah juga mempunyai produk investasi. Misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa ; Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Umat. Dana pensiunan umat ini merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara Syariah. Ada pula Bank Syariah Mandiri (BSM), yang membuka produk penyertaan investasi Reksa Dana.

---

<sup>100</sup> Ismail, *Keuangan Dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi* (tk: Sketsa, 2010), h. 195

- a) Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri. Jenis Reksa Dana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri (BSM), termasuk jenis-jenis reksa dana yang cukup kompetitif, tapi Bank disini hanya menjadi mediator (fasilitator) pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksa dana yang ditawarkan.<sup>101</sup>
- b) Bank Muamalat Indonesia juga melaksanakan penghimpunan dananya melalui produk investasi, seperti produk investasi skim Mudarabah Mutlaqah, Deposito Funlanves, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Bank Muamalat yang menggunakan skim mudarabah mutlaqah memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Begitu pula dengan investasi deposito funlanves menggunakan skim mudarabah mutlaqah dan memperoleh fasilitas asuransi. Selain produk deposito dan funlanves, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk DPLK Muamalat, yaitu investasi dana pensiunan umat yang merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan mengelola investas dilakukan secara syariah. Karakteristik DPLK ini memadukan produk tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan, juga manfaat pensiunan sebesar total iuran dan hasil pengembangan tanpa dicover asuransi jiwa.<sup>102</sup>
- c) Investasi Di Bank Permata Syariah. Permata Tabungan Syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim mudarabah mutlaqah, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan pihak bank (mudarib) sebagai manajer investasi. Selain tabungan investasi syariah ini, Bank Permata Syariah juga membuka produk Permata Pendidikan Syariah. Produk ini adalah suatu investasi jangka panjang yang dilindungi asuransi jiwa syariah secara cuma-cuma. Keistimewaan Produk Permata Pendidikan Syariah sebagai produk investasi jangka panjang secara otomatis dapat asuransi. Juga memberikan perlindungan

---

<sup>101</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung; Alfabeta, 2010), h., 183

<sup>102</sup> *Ibid*



asuransi bebas premi sejak tanggal efektif pembukaan rekening sampai dengan jangka waktu berakhir.<sup>103</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip mudarabah. Jenis investasi yang menggunakan skim mudarabah di bank syariah di bagi menjadi dua.

- 1) Mudarabah Mutlaqah yaitu adalah kerjasama antara dua pihak di mana shahibul mal (pemilik dana) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudarib (pihak yang menjalankan bisnis yaitu bank syariah) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini umum digunakan untuk deposito atau tabungan berjangka. Nasabah tidak perlu menentukan kemana dananya akan diinvestasikan oleh bank Syariah.<sup>104</sup>
- 2) Mudarabah al-Muqayyadah, yaitu kerjasama antara dua 29 pihak di mana shahibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudarib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini biasanya digunakan untuk mewadahi kebutuhan nasabah (umumnya adalah nasabah besar seperti perusahaan dan pemerintah) untuk menggunakan bank syariah sebagai perpanjangan tangannya untuk berinvestasi pada sektor bisnis tertentu. Dana dari nasabah dengan skim mudarabah al-muqayyadah tidak disatukan dalam *pool-of-fund* bank syariah, namun dikelola secara terpisah. Nasabah pemilik dana (shahibul maal) dan bank syariah sepakat dalam akad investasi mudarabah untuk berbagi keuntungan (termasuk kerugian) hasil usaha kegiatan pembiayaan oleh bank syariah yang melibatkan dana nasabah. Perjanjian bagi hasil dituangkan dalam proporsi misalnya 60% untuk nasabah, 40 % untuk bank. Ini yang dikenal dengan nama nisbah bagi hasil. Pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 83

pembiayaan didapatkan, bank syariah akan membagi keuntungan sesuai proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Jika bank syariah mengalami kerugian, maka apakah nasabah akan tetapi menerima bagi hasil atau tidak sangat tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Jika diterapkan revenue sharing seperti umumnya bank syariah di Indonesia maka bagi hasil nasabah akan tetap diterima, namun jika yang digunakan adalah profit sharing, maka nasabah akan menerima bagi hasil jika bank syariah mencatat laba.<sup>105</sup>

Berdasarkan hal ini dapat dibedakan dengan jelas antara bunga bank konvensional dengan manfaat bagi hasil investasi dana bank syariah. Bank Konvensional tidak mengaitkan nilai bunga dengan revenue atau profitnya. Bunga adalah konsekuensi bagi bank umum memegang uang nasabah, tidak peduli apakah uang itu diputar dalam usahanya atau tidak. Sementara pada investasi dana di bank syariah, nasabah mempercayakan bank syariah untuk mengelola dananya. Keuntungan dari usaha pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai nisbah yang dijanjikan.

---

<sup>105</sup> *Ibid.* h. 84

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya*, Jakarta:Galiah, 2002
- Anoraga, Pandji & Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002
- Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Pekanbaru : Cadas Press, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi*, transkrip ceramah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas 2016.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung; Alfabeta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang : UIN Malang press, 2008.
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia edisi pertama*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997.
- Fauzan, Al, Salih Bin Fauzan. *Ringkas Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Hasan, M.Ali. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Ismail, *Keuangan Dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*, tk: Sketsa, 2010.
- Jafri, A.Syafi'i Fiqh Muamalah, Pekanbaru : Suska Press, 2000.
- Jazairi, Al, Abu Bakar Jabr. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Solo : Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005.
- Jaziri, Al, Abdullah Rahman. *Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al Ilmiah.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014.
- Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 )
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2010)
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014)

- Nonet, Philippe and Philippe Selznick. *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, (Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2)
- Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996)
- Partanto , Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001)
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa Bandung, Bandung, 1986
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- Raisuni, Al, Ahmad. *Nadariyat al- Maqasid, Inda Al – Imam al-Shathibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Sitio, Arifin dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001)



Stampford, Charles dan Kim Preston (eds), *Interpreting Constitution: Theories, Principles, and Institutions*, The Federation Press, NSW, 1996.

Syathibi, al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah, Juz I

Swasono, Sri Edi. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), Cet. Ke-2, 1987

Tunggal, Amin Widjaja. *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Widiyanti, Ninik, YW Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002)

Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Yudhanto, Yudho. *Information Technology Business Startup* (Ilmu Dasar Merintis Tartup Berbasis Teknologi Informasi), (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018)

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

#### **Sumber Jurnal :**

Amin, Muhammad. *Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi* (Tesis), Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018.

Estiyanti, Ni Made dan Putu Dian Rusmadewi, *Analisa Nilai Valuasi Perusahaan Startup Berdasarkan Faktor Keuangan Dan Non Keuangan* (Studi Kasus Perusahaan Startup Xyz) Jurnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma (Vol 22, No 2 Desember 2016).

Kamuntuan, Stefan E. *Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia* (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2018.

Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), *Startup Coop sebagai Inovasi Model Koperasi di Indonesia* Sebuah Gagasan dan Praktik Awal, Paper dipresentasikan di Platform Cooperativism Conference, New York, 7-9 November 2019 di mana ICCI mewakili Indonesia untuk membagi praktika dan gagasan yang sedang berkembang di tanah air.

Masse, Rahman Ambo *Konsep Mudharabah* Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010).

Perdani, Maria Dolorosa Kusuma dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Startup Di Yogyakarta*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.

Puspitasari, Lilis Hanny Hafiar dan Rully Khairul Anwar. *Literasi Informasi Media*, (EduLib, Vol 1, No.1 Mei 2014).

Puteri, Ariska Aisyah Ananda. *Esensi Makna Dan Fungsi Asas Kekeluargaan Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 2018.

Sakinah, *Investasi dalam Islam*, (Jurnal Iqtishadia Vol. 1 No.2 Desember 2014)

Suwarno, Dodi Jayen Annita Silvianita. *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*, Jurnal Ecodemica Vol. 1 No. 1, Universitas Telkom, Bandung, 2017.

Toriquddin, Moh. Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Yunus, Achmad. *Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Prespektif Hukum Transendental*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

#### **Sumber Hukum, fatwa dan peraturan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik .

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh).

### Sumber Internet :

Prio Penangsang, *Meretas Era Baru Coop Platform*, 2018 (<https://milesia.id/2018/08/31/meretas-era-baru-coop-platform-dan-coop-tart-up/>) diakses pada tanggal 20 Januari 2019

Laksono Hari Wiwoho, *Start up Co-op, Koperasi Generasi Milenial*, 2018 (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/125742026/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial?page=all>) diakses pada tanggal 15 Mei 2020

Viska, *Kominfo Luncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital* ([https://kominfo.go.id/content/detail/7689/kemkominfo-bersama-kibar-luncurkan-gerakan-nasional-1000-startup-digital/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/7689/kemkominfo-bersama-kibar-luncurkan-gerakan-nasional-1000-startup-digital/0/berita_satker)) diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 19.44 WIB.

Tim Idcloudhost, “Menenal Apa Itu Startup. Pengertian, dan Perkembangan Bisnis Startup di Indonesia” (<https://idcloudhost.com/menenal-apa-itu-startup-pengertian-dan-perkembangan-bisnis-startup-di-indonesia/>) diakses pada tanggal 29 Juli 2020 Pukul 13.00 WIB

Dandy Bayu, *5 Visi Jokowi untuk Indonesia*, (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all>) diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

### Sumber lainnya :

Fonterra Annual Report 2010

Fonterra Annual Report 2018